Tangkoko Jurnal Manajemen dan Akuntansi 10(2): 37-47
e-ISSN: 3062-8873 https://ejournal.stiepetrabitung.ac.id/index.php/JT

ANALISIS REALISASI ANGGARAN DALAM PENILAIAN KINERJA KEUANGAN PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BITUNG

Gicela Tirza Karundeng[1], Friska Langelo[2], Gebriany P. Wenur[2]
[123]Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Petra
Email: gicelatirzakarundeng@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini didasari oleh masalah anggaran yang dihadapi oleh kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bitung. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui realisasi anggaran dalam rangka menilai kinerja keuangan Satuan Polisis Pamong Praja Kota Bitung agar dalam melakukan penyusunan anggaran secara rinci pada suatu perusahaan dengan mengurangi ketidakpastian dan memberikan arahan yang jelas kepada individu atau kelompok dalam mencapai tujuannya. Dalam penelitian ini, peneliti membandingkan laporan realisasi anggaran tahun 2021-2023 karena Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bitung, menunjukkan pada tahun 2021 - 2023 mengalami kenaikkan dan penurunan persentasi karena setiap tahun target dan realisasi berbeda-beda. Pada tahun 2021 persentase 93.70%. Pada tahun 2022 persentase 96,84% mengalami kenaikan sebesar 3,14%. Kemudian pada tahun 2023, persentasi 93,77% mengalami penurunan sebesar 3,07%. Untuk mengetahui penilaian kinerja keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bitung peneliti menggunakan rumus rasio efektivitas dan efisiensi. Metode yang digunakan penelit yaitu deskriptif kuantitatif. Data diperoleh melalui studi lapangan. Hasil penelitian diperoleh dari laporan realisasi anggaran, efektivitas penerimaan PAD dan efisiensi anggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bitung Tahun Anggaran 2021-2023 kurang efektif dan kurang efisiensi karena penggunaan anggaran belanja yang terlalu tinggi.

Kata Kunci: Realisasi Anggaran, Penilaian Kinerja Keuangan.

Abstract

This research is based on the budget problems faced by the Bitung City Civil Service Police Unit office. The aim of this research is to determine the realization of the budget in order to assess the financial performance of the Bitung City Civil Service Police Unit in order to prepare a detailed budget for a company by reducing uncertainty and providing clear direction to individuals or groups in achieving their goals. In this research, researchers compared the 2021-2023 budget realization report for the Bitung City Civil Service Police Unit, showing that in 2021 - 2023 the percentage experienced an increase and decrease because each year the target and realization were different. In 2021 the percentage is 93.70%. In 2022, the percentage of 96.84% will increase by 3.14%. Then in 2023, the percentage of 93.77% will decrease by 3.07%. To determine the financial performance assessment of the Bitung City Civil Service Police Unit, researchers used the effectiveness and efficiency ratio formula. The method used by researchers is quantitative descriptive. Data obtained through field studies. The research results were obtained from the budget realization report, the effectiveness of PAD revenue and budget efficiency in the Bitung City Civil Service Police Unit for the 2021-2023 Fiscal Year was less effective and less efficient due to the use of an expenditure budget that was too high.

Keywords: Budget Realization, Financial Performance Assessment.

PENDAHULUAN

Realisasi anggaran digunakan sebagai indikator seberapa jauh suatu organisasi telah mencapai target atau alokasi anggaran dalam periode waktu tertentu. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah dokumen penyajian informasi tentang anggaran dalam suatu organisasi yang digunakan selama pelaporan anggaran.

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023. Di Kota Bitung lebih tepatnya pada Instansi Satuan Polisi Pamong Praja dari tahun 2022 - 2023 terdapat perubahan anggaran sehingga timbulnya masalah pada anggaran, yaitu alokasi anggaran kegiatan yang dimasukkan dalam program yang dibuat untuk kebutuhan uang persediaan periode satu bulan atau lebih yang tidak direncanakan dengan baik.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bitung terdapat permasalahan pada anggaran. Penyebab permasalahan yang terjadi karena keterlambatan penyaluran gaji Tenaga Harian Lepas (THL) dikarenakan adanya perubahan anggaran dan jumlah THL di Satpol PP Kota Bitung yang sudah melebihi dari jumlah yang seharusnya sudah ditetapkan pada APBD. Karena jumlah THL sudah melebihi dari jumlah yang di anggarkan pada APBD, maka Pembayaran gaji Satpol PP Kota Bitung, dari jumlah Tenaga Harian Lepas berjumlah 238 orang ditetapkan didalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Dengan berjalannya waktu anggota Tenaga Harian Lepas bertambah menjadi 306 orang dan kelebihan 68 orang sehingga dalam pembuatan pembandingan laporan anggaran dari tahun 2021 sampai 2023 terdapat selisih yang sebelumnya sudah dianggarkan dalam biaya pada APBD dan terjadi keterlambatan gaji pada Tenaga Harian Lepas.

Selain terjadi keterlambatan gaji karena kelebihan jumlah THL juga terdapat masalah yang berhubungan dengan diatas, yaitu pada tahun 2023 honor dari THL Satpol PP cukup sampai terjadinya perubahan anggaran, tetapi Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satpol PP membiayai THL Dinas Damkar karena pada saat itu Dinas Damkar masih masuk dalam Bidang Satpol PP.

Pada tahun 2021 sampai tahun 2023, Damkar masih satu bidang dan DPA dengan Satpol PP. Setelah Damkar pisah dari Satpol PP dan sudah mempunyai DPA sendiri akan tetapi belum bisa digunakan anggarannya karena belum dilantik anggota, disebabkan proses administrasi pada bulan juni setelah pengisian anggota. Maka pada bulan sebelumnya gaji dan operasionalnya masih dibiayai oleh DPA Satpol PP sehingga anggaran dalam DPA Satpol PP triwulan tiga dan empat ditarik untuk membayar honor Satpol PP dan Damkar agar keperluan operasionalnya jelas

TINJAUAN PUSTAKA

Realisasi anggaran

Menurut Tambun (2015), realisasi anggaran merupakan elemen penting dalam pengelolaan keuangan publik dan berperan dalam pemantauan dan mengevaluasi nilai serta penggunaan dana publik dan pencapaian tujuan yang telah ditentukan dalam waktu tertentu.

Penilaian Kinerja Keuangan

Penilaian kinerja adalah proses yang dilakukan oleh sebuah organisasi untuk mengevaluasi dan mengukur kinerja individu, kelompok, atau departemen dalam mencapai tujuan dan tugas yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

Menurut Ramadhani (2023), Kinerja keuangan adalah analisis yang dilakukan untuk

menilai, mengevaluasi, dan memeriksa perusahaan dalam menerapkan kebijakan dan aturan yang baik dan benar terkait pelaksanaan keuangan. Analisis kinerja keuangan dilakukan dengan cara mengevaluasi kinerja masa lalu untuk memperkirakan potensi kinerja perusahaan di masa depan, serta meninjau ulang kejadian di masa lalu untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan di masa yang akan datang.

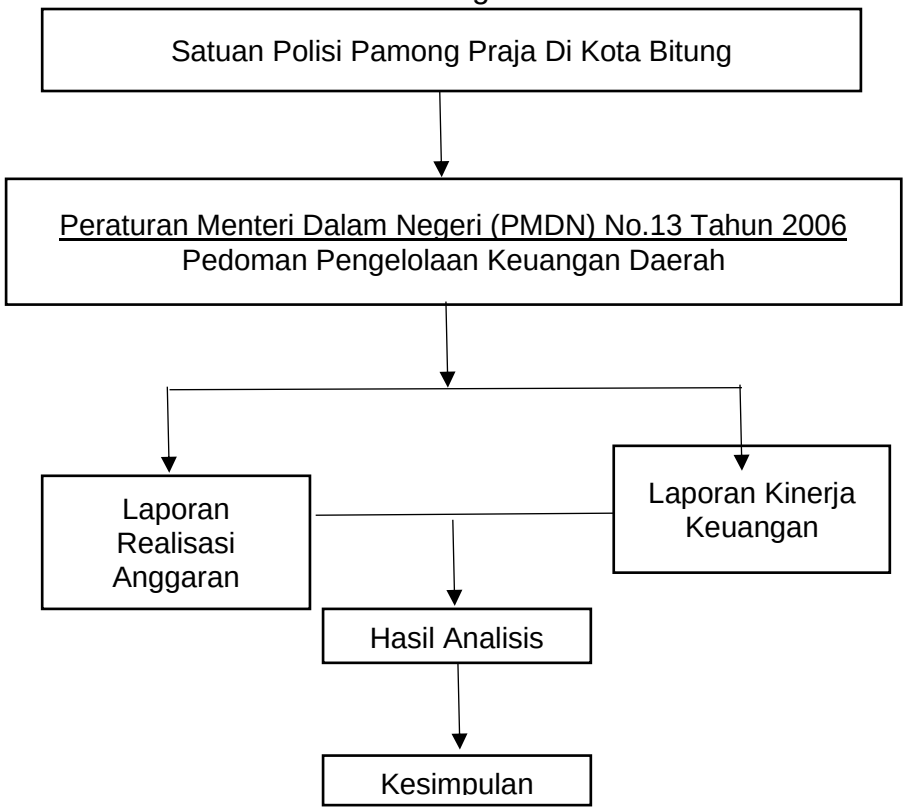
Penelitian Terdahulu

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Teknik Penelitian	Hasil Penelitian
Ruqidul Hajah Alhabsi, Dkk (2023).	Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2021.	Teknik penelitian analisis rasio keuangan, yaitu rasio efektivitas dan rasio efisiensi. deskriptif kualitatif.	Berdasarkan hasil penelitain yang telah dilakukan, pemerintah daerah Kabupaten Magelang diharapkan dapat melakukan evaluasi dengan mencermati rasio efektivitas dan efisiensi untuk tahun yang akan datang.
Hanifa dan Kamarudin (2022).	Analisis Kinerja Anggaran Belanja Pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Baubau Tahun 2017-2020.	Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah, observasi, dokumentasi, studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif.	Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: Kinerja anggaran belanja tahun 2017 adalah belanja operasi 89,77 %, tahun 2018 adalah 85,51 %, tahun 2019 adalah 88,84 %, tahun 2020 adalah 97,95 % yang berarti penggunaan belanja operasi tahun 2-17-20200 lebih dioptimalkan dalam penggunaan belanja daerah.

Kerangka Pemikiran

Gambar 1. Kerangka Pemikiran



Penelitian ini didasari oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Penyusunan anggaran merupakan proses pembuatan rencana kerja dalam rangka waktu satu tahun, yang dinyatakan dalam satuan moneter dan satuan kuantitatif orang lain. Laporan Realisasi Anggaran atau biasa sering disingkat dengan LRA merupakan laporan yang menyajikan berbagai informasi mengenai realisasi anggaran, belanja dan pembiayaan. Penelitian ini dapat melihat perbandingan LRA dari tahun 2021-2023 pada Satpol PP di Kota Bitung.

Penilaian kinerja adalah suatu proses dimana organisasi dalam mengevaluasi dan mengukur kinerja seseorang, kelompok ataupun departemen dalam mencapai tujuan dan tugas sudah di tetapkan dalam perusahaan. Kinerja keuangan adalah suatu organisasi atau entitas mengevaluasi dan mengukur kesehatan keuangannya. Pada penilaian ini akan di ukur Tingkat Penilaian Kinerja Keuangan dengan menggunakan rasio yang ada, yaitu : rasio efektivitas dan rasio efisiensi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif yaitu mendeskripsikan secara kuantitatif bagaimana realisasi anggaran dalam penilaian kinerja keuangan dan cara menganalisis dengan pengumpulan data dan wawancara serta menganalisis data secara langsung yang bertujuan untuk mendapatkan data yang akurat dan detail.

Defenisi Operasional

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala
Efektivitas Anggaran	Sejauh mana penggunaan anggaran mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana program atau kegiatan.	Persentasi program atau kegiatan yang mencapai target.	Rasio
Efesiensi Anggaran	Tingkat penggunaan anggaran tanpa pemborosan sumber daya, diukur dengan membandingkan hasil dengan biaya yang dikeluarkan.	Rasio output terhadap input dan biaya kegiatan yang selesai tepat waktu.	Rasio

Tabel 2. Definisi Operasional

Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer merupakan data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber asli. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bitung dari hasil wawancara
2. Data Sekunder diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Penilaian Kinerja Keuangan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bitung, Laporan Realisasi Anggaran serta studi dokumentasi.

Populasi dan Sampel

Didalam penelitian ini, populasi yaitu perbandingan laporan realisasi anggaran dari tahun 2021-2023 dan laporan penilaian kinerja keuangan pada Satpol PP di Kota Bitung. Sampel pada penelitian ini yaitu terdapat beberapa populasi yang akan dilakukan penilitian dengan menggunakan laporan realisasi anggaran dan laporan kinerja keuangan tahun 2021-2023 pada Satpol PP di Kota Bitung.

Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi, adalah teknik pengumpulan data yang paling utama pada penelitian karena bertujuan untuk mengetahui teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan mendapat data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Dalam observasi ini peneliti mengambil objek berupa laporan realisasi anggaran dalam penilaian kinerja keuangan pada Satpol PP Kota Bitung.
2. Wawancara, adalah proses tanya jawab yang terstruktur dengan tujuan wawancara untuk menemukan masalah pada objek secara terbuka dimana pihak yang bersangkutan menjelaskan ide-ide dan pendapatnya.
3. Dokumentasi, salah satu teknik yang digunakan dalam pengumpulan data berupa informasi peraturan yang berkaitan dengan kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi, khususnya menganalisis realisasi anggaran dalam penilaian kinerja keuangan pada Satpol PP Kota Bitung.

Teknik Analisis

Teknik analisis data yang digunakan yaitu data kuantitatif berupa angka untuk menarik setiap kesimpulan yang ada dalam penelitian yang berupa data mentah, kemudian memberikan penjelasan atas latar belakang. Penelitian ini menggunakan laporan realisasi anggaran dan mengukur tingkat pencapaian kinerja dengan menggunakan rasio efektifitas dan efisiensi. Analisis data menggunakan tingkat capaian kinerja yang digunakan untuk melihat tingkat keberasilan sasaran kerja dalam menjalankan sasaran kinerja, analisis efisiensi digunakan untuk menilai tingkat efektivitas dalam pengendalian internal.

Dalam menganalisis data peneliti menggunakan alat analisis untuk menjawab permasalahan sebagai berikut:

1. Mengambil data dan melakukan tabulase data yang akan digunakan pada proses analisis data.
2. Perhitungan menggunakan rasio yang akan digunakan dalam mengukur kinerja keuangan. Adapun rumus dalam menghitung kinerja keuangan pada laporan realisasi anggaran, yaitu:
   a. Rasio Efektivitas Keuangan Daerah untuk mendapatkan rasio efektivitasnya melalui penerimaan PAD dapat dihitung realisasi Penerimaan PAD dibahagi dengan target Penerimaan PAD yang direncanakan. Rumus rasio efektivitas bisa dilihat pada (2.1).
   b. Rasio Efisiensi Rasio efisiensi membandingkan biaya yang dikeluarkan pendapatan dengan hasil realisasi pendapatan. Rumus rasio efisiensi bisa dilihat pada (2.2).
3. Hasil analisis akan ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan pada Kantor Satpol PP Kota Bitung

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Perbandingan Realisasi Anggaran Satuan Pamong Praja Kota Bitung tahun 2021-2023, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3. Realisasi Anggaran SATPOL PP BITUNG

Tahun	Target	Realisasi	%
2021	14.348.570.467	13.445.309.293	93.70%
2022	17.276.982.860	16.730.711.033	96.84%
2023	16.114.362.577	15.110.852.734	93.77%

Sumber: LRA pada Satpol PP di Kota Bitung.

Berdasarkan Tabel diatas, Perbandingan realisasi anggaran tahun 2021-2023. Realisasi anggaran Satpol PP pada tahun 2021 target 14.348.570.467 dan realisasi 13.445.309.293 dengan persentase 93.70% sangat baik. Pada tahun 2022 target 17.276.982.860 dan raelisasi 16.730.711.033 dengan persentase 96,84% mengalami kenaikan sebesar 3,14%. Kemudian pada tahun 2023, target 16.114.362.577 dan realisasi 15.110.852.734 dengan persentase 93,77% mengalami penurunan sebesar 3,07%. Pada tahun 2021-2022 ada kenaikan persen karena pada LRA masih satu Dokumen Pelaksanaan Anggaran dengan Dinas Damkar, sedangkan pada tahun 2023 terjadi penurunan persentasi kerena jumlah pagu anggaran atau batas pengeluaran tertinggi yang dalam pelaksanaannya tidak boleh melebihi batas lebih kecil daripada pagu tahun lalu waktu Dinas Damkar masih satu DPA dengan Bidang Satpol PP dan karena kurangnya dana yang

tersedia dari dinas pemerintahan daerah mempengaruhi keterlambatan penyaluran gaji pada Thl Satpol.
Penilaian Kinerja Keuangan menggunakan rumus Rasio Efektivitas dan Rasio Efesiensi.

Tabel 4. Penilaian Kinerja Keuangan

Tahun	Pendapatan			Belanja		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
2021	325.000.000	236.510.200	73%	14.348.570.467	13.445.309.293	94
2022	358.312.500	307.772.000	85,89	17.276.982.860	16.730.711.033	96,84
2023	-	-	-	16.114.362.577	15.110.852.734	93,77

Sumber: Data diambil dari laporan kinerja keuangan pada Satpol PP di Kota Bitung.

Berdasarkan tabel diatas, Pada tahun 2021 hasil dari rasio efektivitas mencapai 73%. Hal tersebut dapat dilihat bahwa kinerja Satpol PP Kota Bitung lebih rendah dan tahun 2022 rasio efektivitas senilai 85,88% mengalami kenaikan sebesar 12,89%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Satpol PP Kota Bitung cukup efektif. Kemudian pada tahun 2023, rasio efektivitas sebesar 0% mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Satpol PP Kota Bitung tidak efektif karena pada tahun 2023 ini tidak terdapat pendapatan anggaran dan realisasi akibat terdapat perubahan anggaran karena diterbitkan Perda Nomor 8 Tahun 2022 tentang Program Strategis Dan Unggulan Daerah Selesaikan Permasalahan Rakyat, dimana Bidang Damkar diubah menjadi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Daerah dan retribusi yang seharusnya masih digabung dari Bidang Satpol PP dan Bidang Damkar sekarang sudah pindah retribusinya di Dinas Damkar. jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu tahun 2022 cukup efektif dari tahun 2021.
Kriteria Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327 Tahun 1996, tentang kriteria tingkat kinerja keuangan, penetapan tingkat efektivitas anggaran belanja sebagai berikut:

Kriteria Efektivitas	Pengukuran Persentase
Sangat Efektif	>100%
Efektif	90%-100%
Cukup Efektif	80%-90%
Kurang Efektif	60%-80%
Tidak Efektif	0%-60%

Sumber: Kepmendagri Tahun 1996 Nomor 690.900-23

Kriteria Efisiensi	Pengukuran Persentase
Sangat Efisien	0%-60%
Efisien	60%-80%
Cukup Efisien	80%-90%
Kurang Efisien	90%-100%
Tidak Efisien	>100%

Sumber: Kepmendagri Tahun 1996 Nomor 690.900-237.

Berdasarkan tabel kriteria efektivitas diatas menunjukkan bahwa, persentasi diatas 90% - 100% adalah hasil yang efektif pada laporan anggaran belanja. Sedangkan, persentasi 0% - 60% menunjukkan pada laporan persentasi kurang efektif. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327 Tahun 1996, tentang kriteria tingkat kinerja keuangan, penetapan tingkat efisiensi anggaran belanja sebagai berikut:

Berdasarkan tabel efisiensi diatas, semakin tinggi pencapaian persentasi maka semakin tidak efisiensi persentasinya karena anggarannya tidak menyimbangi dan dikatakan sangat efisien jika persentasi pada kriteria ini mendapatka hasil 0% - 60%.Hasil dari perhitungan dalam mengukur kinerja keuangan pada realisasi anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bitung tahun 2021-2023, dengan menggunakan rumus efektivitas dan efisiensi, sebagai berikut:

Tabel 5. Mengukur Kinerja Keuangan Menggunakan Rumus Efektivitas

Tahun	Realisasi Penerimaan PAD	Anggaran PAD	Efektivitas
2021	236.510.200	325.000.000	72,77%
2022	307.722.000	358.312.500	85,88 %
2023	0	0	0 %

Sumber : Data Olahan 2024

Berdasarkan tabel diatas adalah hasil dari mengukur kinerja keuangan menggunakan rumus efektivitas dimana Realisasi Penerimaan Pendapatan Anggaran Daerah di bahagi dengan Anggaran Penerimaan Anggaran Daerah dan di kali dengan 100% maka akan mendapatkan hasilnya. Pada tahun 2021 Realisasinya sebesar 236.510.200 di bahagi dengan 325.000.000 dan di kali dengan 100% hasilnya 72,77% hasil tersebut di kriteriakan kurang efektif karena di bawah dari 80% begitupun selanjutnya sampai ke tahun 2023.

Tingkat efektivitas jika persentasi tinggi maka nilai efektivitas, yaitu mendekati 100% atau lebih dari 100% berarti tingkat efektivitas baik. Pada tahun 2021, kinerja keuangan Satpol PP Kota Bitung ini dinilai kurang efektif karena masih di bawah 80%. Pada tahun 2022, kinerja keuangan Satpol PP Kota Bitung dinilai cukup efektif dalam pengelolaan anggaran keuangan dengan persentasi 85,88%. Sedangkan pada tahun 2023 kinerja keuangan mengalami penurunan sehingga dikatakan tidak efektif karena pada tahun 2023 persentasi 0% dikarenakan telah mengalami perubahan anggaran karena DPA Satpol PP pisah dengan DPA Damkar, maka anggaran tidak sesuai dengan tahun 2021 dan 2022

Tabel 6. Mengukur Kinerja Keuangan Menggunakan Rumus Efesiensi

Tahun	Realisasi Belanja	Anggaran Belanja	Efisiensi
2021	13.445.309.293	14.348.570.467	93,70 %
2022	16.730.711.033	17.276.982.860	96,83 %
2023	15.110.852.734	16.114.362.734	93,77 %

Sumber: Data Olahan 2024

Tabel diatas adalah pengukuran kinerja keuangan dengan menggunakan rumus efisiensi maka cara perhitungannya dengan membagin Realisasi Belanja dengan Anggaran Belanja dan di kali dengan 100% maka akan mendapat hasil persentasinya. Seperti pada tahun 2021 dengan Realisasi 13.445.309.293 dibagi dengan Anggaran 14.348.570.467 dan di kali dengan 100% maka jumlah persentasi 93,70% hasil tersebut kurang efisien dan selanjutnya perhitungannya sampai pada tahun 2023.

Efisiensi di atas menunjukkan bahwa rasio efisiensi pada tahun 2021 senilai 93,70%, sedangkan pada tahun 2022 rasio efisiensi senilai 96,83% kenaikkan senilai 3,13%. Kemudian pada tahun 2023, rasio efisiensi sebesar 93,77% dan mengalami penurunan sebesar 3,06%. Semakin tinggi nilai efisiensinya, yaitu mendekati 100% atau lebih dari 100%, maka semakin buruk efisiensinya karena apa yang sudah direncanakan tidak boleh melebihi dari apa yang sudah ditetapkan.

Tabel 7. Kriteria Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja

	Tahun	Tingkat Persentase	Keterangan
Efektivitas	2021	72,77%	Kurang Efektif
	2022	85,88 %	Cukup Efektif
	2023	0	Tidak Efektif
Efisiensi	2021	93,70 %	Kurang Efisien
	2022	96,83 %	Kurang Efisien
	2023	93,77 %	Kurang Efisien

Sumber: Data diolah peneliti.

Berdasarkan tabel diatas, perhitungan dalam mengukur kinerja keuangan pada realisasi anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bitung tahun 2021-2023, dengan menggunakan rumus efektivitas dan efisiensi, sebagai berikut:

1)Tahun 2021

a) Efektivitas = $\frac{236.510.200}{325.000.000} \times 100\ \%$

= 72,77 %

b) Efisiensi = $\frac{13.445.309.293}{14.348.570.467} \times 100\ \%$

= 93,70 %

2)Tahun 2022

a) Efektivitas = $\frac{307.722.000}{358.312.500} \times 100\ \%$

= 85,88 %

b) Efisiensi = 16.730.711.033 x 100 %
17.276.982.860
= 96,83 %

3)Tahun 2023

a)Efektivitas = 0 x 100 %
0
= 0 %

b)Efisiensi = 15.110.852.734 x 100 %
16.114.362.734
= 93,77 %

Pembahasan

Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas dan efisiensi realisasi anggaran dalam penilaian kinerja keuangan sejalan dengan penelitian terdahulu Ruqidul Hajah Alhabsi., dkk, (2023). Hasil dari penelitian kinerja pemerintahan daerah Kabupaten Magelang 2019 dinilai belum efektif karena persentasi dibawah 100% , sedangakan tahun 2020-2021 diatas 100%. Hal tersebut mempengaruhi realisasi pendapatan asli daerah pemerintahan Kabupaten yang belum maksimal. Sedangkan hasil efisiensi dari tahun 2019-2021 cukup efisiensi dalam pengelolaan anggaran keuangan daerah karena persentasi tidak diatas 100%.

Berdasarkan teori efektivitas suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan perencanaan yang baik dengan mutu yang dapat dikatakan efektif. Jadi, semakin tinggi tingkat efektivitas maka semakin baik karena pengukuran keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Berdasarkan teori efisiensi merujuk pada pencapaian hasil atau target sesuai dengan yang ditetapkan. Semakin tinggi tingkat efisiensi maka semakin tidak baik karena anggaran yang di tetapkan tidak boleh melebihi dengan apa yang sudah ditetapkan dari perencaaan dan penerapan yang ada. Perencanaan setiap tahun sebelum Satpol PP menggunakan anggaran tersebut maka harus membuat rencana kerja yang memuat anggaran belanja langsung dan anggaran belanja tidak langsung sesuai dengan perubahan peraturan yang berlaku.

SIMPULAN

1. Perbandingan Laporan Realisasi Anggaran Satpol PP Kota Bitung, menunjukkan bahwa pada tahun 2021 sampai 2022 mengalami kenaikkan dan pada tahun 2023 terjadi penurunan persentasi karena pada tahun 2023 terdapat perubahan anggaran.
2. Penilaian Kinerja Keuangan dilihat dari Rasio Efektivitas, Pada tahun 2021 - 2023, tingkat persentasi yang cukup efektif pada tahun 2022 dengan persentasi 85,88%. Dan kurang efektif pada tahun 2023 dengan persentasi 0%.
3. Penilaian Kinerja Keunagan dilihat dari Rasio Efisiensi, Pada tabel efisiensi, peneliti melakukan perhitungan dari tahun 2021-2023 dengan hasil kurang efisien karena persentasi diatas 90%. Semakin mendekati 100% atau lebih penggunaan anggaran belanja yang di targetkan perusahaan, maka semakin buruk efisiensinya.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad, Sudiro. (2019). Penilaian Kinerja. Malang : Penerbit UB Press.

Akhmad, Fauzi dan Rusdi, Hidayat,Na. (2020). Manajemen Keuangan. Surabaya : Penerbit Airlangga University Press.

Amin. (2019). Penganggaran di Pemerintah Daerah. Malang : UB Press.

Nurul Aziza. (2023). Metodologi Penelitian 1. Bandung : Penerbit Media Sains Indonesia.

Edi,Yanto., dan Nurfitriana. (2022). Konsep Dasar Penganggaran Perusahaan. Bandung : CV. Widina Bhakti Persada.

Francis, Hutabarat. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan. Banten : Penerbit Desanta Muliavisitama.

Halkadri, Fitria. (2019). Analisis Neraca dan Pelaporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah. Malang : CV IRDH.

H, Nazir Asman. (2022). Anggaran Perusahaan. Cirebon : Penerbit Adab.

Kurniawan dan Puspitaningtyas. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif. Yogyakarta : Pandiva Buku.

Muhammad, Syaifullah., dan M, Khairul Anwari. (2020). Kinerja Keuangan Bank Syariah dengan Assset Quality, Earnings, Liquidity dan Sharia Conformity. Depok : Penerbit Pt Rajagrafindo Persada.

Rosmaida, Tambun. (2015). Penganggaran Perusahaan. Politeknik Negeri Medan.

Sari. (2019). Pengukuran Kinerja Keuangan Berbaris Good Corporate Govermance. Medan : Umsu Press.

Sujarweni. (2017). Analisis Laporan Keuangan : Teori, Aplikasi, dan Hasil Penelitian. Yogyakarta : Pustaka Baru Press.

Zainab dan Uswatun, Khasanah. (2022). Penganggaran Perusahaan. Padang Sumatera Barat : Penerbit Pt. Global Eksekutif Teknologi.